

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Dikutip dari Muhaimin Metode Penelitian Hukum. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Anggara, Dr. Sahya. Hukum Administrasi Negara. Cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Arsyad, Azhar. Etika Pemerintahan dalam Islam. Yogyakarta: Gema Insani, 2010.
- Asmara, Dr. Galang, SH, M.Hum. Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Cetakan pertama. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2005.
- Basuki. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua (revisi). Yogyakarta: Kreasi Wacana, Februari 2008.
- Budhi Masthuri. Mengenal Ombudsman Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.
- Handayani Roswati. Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dan Pemerintah yang Baik. Yogyakarta: Pusham UII.
- Hendra Nurtjahjo, Yustus Maturbongs, dan Diani Indah Rachmitasari. Memahami Maladministrasi. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, Maret 2013.
- Muchsan. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Nora Agustian. Perkembangan Peserta Didik. Yogyakarta: Deepublish, September 2018.
- Ridwan HR, Dr. Hukum Administrasi Negara. Cet-16. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Rohiat. Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Salamoen dan Nasri. Administrasi Negara: Konsep, Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sujamto. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika, Mei 1996.
- Sujata, Antonius & RM Surachman. Catatan Perjalanan Sebelas Tahun Ombudsman Republik Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta: IDCC, 2011.
- Sururama, Dr. Rahmawati, S.STP, M.Si. Pengawasan Pemerintahan. Bandung: CV Cendekia Press, 2020.
- Syafiie, Prof. Dr. H. Inu Kencana, M.Si dan Welasari, SIP., M.Si. Ilmu Administrasi. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, September 2015.
- Tjandra, W. Riawan. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2009.

Jurnal

- Adhyaksa Nugraha Zain, "Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atas Praktik

- Maladministrasi Dalam Pemerintahan,” *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2025.
- Agil Nanggala, *Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 2, Mei 2020.
- Albert Otniel Rondonuwu, dkk. “Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 13 Februari 2022.
- Alma Oktafiana, Yolanda Fitria Laksanti, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Indonesia,” *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 5, No. 2, Oktober 2020.
- Alma Oktafiana, Yolanda Fitria Laksanti, dan Dian Suluh Kusuma Dewi, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Indonesia,” *JIPP: Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2, Oktober 2020.
- Antonius Sujjata dan RM Surachman, “Pengantar Peluncuran Ombudsman Indonesia di tengah Ombudsman Internasional,” Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2002.
- Arnoldus Pawe dan Rizky Karo Karo, “Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal,” *Jurnal Lemhannas RI*, Vol. 10, No. 2. 2020.
- Ayu Prasetyaningrum, Sri Marmoah, *Analisis SWOT Manajemen Peserta Didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Negeri*, *Jurnal Basicedu* Volume 6 Nomor 4 Tahun 2022.
- Azhar Abbas, Karol Teovani Lodan, “Peran Pengawasan Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik” *Jurnal Dialektika Publik - Vol. 5 No. 1*, Agustus, 2020.
- Dewi Purwati, Tri Hayati, “Relevansi Maladministrasi Penundaan Berlarut Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Pemenuhan Hak Kepastian Hukum Bagi Korban Dan Tersangka” *Jurnal Darma Agung* Volume: 31, Nomor: 3, Juni 2023.
- Didi, "Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Menyelesaikan Laporan Dugaan Maladministrasi." *Progresif: Jurnal Hukum*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2023.
- Dinar Wahyuni, *Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2023/2024 Jalur Zonasi*, Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI Vol. XV, No. 16/II/Pusaka, Agustus 2023.
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Analisis Yuridis Pelayanan Publik Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Dalam Konsep Welfare State,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5, 2014.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2, Beirut Dar al-Fikr, 2000.
- Ipan Nurhidayat, “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia” *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government* Volume 1 Nomor 1, Februari 2023.

- Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut. "*Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*," Vol. 11; No. 02; November 2020.
- Iswinarno, Chandra. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di DIY." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol 7, No 3, Desember 2020.
- Jaka Andhika, "Pemeriksaan Ombudsman sebagai Magistrature Of Influence" Selasa 23 Maret 2021.
- Jayanti Armida Sari, "Pengawasan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA*, Volume 10 Nomor 2, 2022.
- Lawrence Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Cet. IV T, Bandung, Nusamedia, 2018, hlm. 14-16.
- Lingga Abi Rahman, "Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara", *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* Volume. 1, Nomor. 4 Tahun 2024.
- Lizha Rufahniyah, "Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program pencegahan maladministrasi di Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur" *Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik* Vol. 3 No. 2, 2025.
- M. Afdhal Arrazak, "Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* Volume 2, No.12 Desember 2024.
- Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila," *Likhita Prajna Jurnal Ilmiah* 23, No. 2, September 2021.
- Muhammad Chandra Febrianto, *Strategi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mendorong Kualitas Pelayanan Publik Melalui Laporan Masyarakat*, *Jurnal Administrasi Negara* Volume 29 Nomor 3, Edisi Desember 2023.
- Musataklima, S.H.I., M.S.I. "Efektivitas Penanganan Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Perspektif Politik Hukum Di Indonesia."
- Nabila Firstia Izzati "Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di Indonesia" *Jurnal Terakreditasi Nasional*. Volume 26 Nomor 2, April - Juni 2020.
- Nani Yuliani, *Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi*, "Presumption Of Law" Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Volume 3 Nomor 1 April 2021.
- Nora Agustian, "Perkembangan Peserta Didik", Yogyakarta: Deepublish, September 2018.
- Nuriyanto, "Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* 11, No. 3 September 2014.
- Nurlita Purnama, Annisa Miskiyah, dan Muhammad Khoirul Anwar, "Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia," *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 1 Februari 2023.

- Prof. Ahmad Ali Nurdin, MA., Ph.D. *Ayat-ayat Administrasi Publik dalam Al-Qur'an* Edisi 1, Penerbit: Jurusan Administrasi Publik Fisip Uin Sgd Bandung.
- Rajin Sitepu, Isdiana Syafitri, "Analisis Terhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir Pemeriksaan/Rekomendasi Ombudsman", *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024.
- Rini Raharti, Henry Sarnowo, dan Laila Nur Aprilia, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, vol. 5, no. 2, September 2020.
- Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol. 2, No. 1, Maret 2000.
- Sheila Gottehrer, Penjelasan pada sesi indromal lokakarya dua hari tentang Ombudsman Daerah (Denpasar, Bali 21-22 Februari 2002).
- Solechan, "Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.1 No. 2, Mei 2018.
- Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman Dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti Jurnal Berkala Fakultas Hukum*, Vol 2, No 1 Juni 2023.
- Wilensky, H. L. "The Welfare State: Convergence and Divergence." Dalam *Rich Democracies: Political Economy, Public Policy, and Performance*. 2002.
- Yuswarni, Diemyati Soedja, Silvia Balqis, Arizal, *Ombudsman Dalam Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik*, "Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Asian)," Volume 12 Nomor 1 Maret 2024.
- Zainuddin "Hukum Administrasi Negara Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Pelayanan Publik." In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, vol. 4, no. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 – Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
- Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri
Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
Peraturan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Dokumen dan Substantif

Bahan Internet

- Adji G. Rinepta, "ORI DIY Ungkap Dugaan Manipulasi KK di PPDB SMA," *detikJogja*, terdapat dalam <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7421402/ori-diy-ungkap-dugaan-manipulasi-kk-di-ppdb-sma>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.
- Arman, S.Pd, "OPINI : Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam," terdapat dalam <https://jejaktokoh.com/opini-artikel/opini-pelayanan-publik-dalam-perspektif-islam/>, Diakses tanggal 12 Juni 2025.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, "Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan," terdapat dalam <https://ntt.bpk.go.id/tindak-lanjut-hasil-pemeriksaan-2/>. Diakses tanggal 6 Mei 2025.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maladministrasi>. Diakses tanggal 22 Mei 2025.
- Estomihi FP Simatupang, SH, "Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman", terdapat dalam <https://www.berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Legal-System-Lawrence-M-Friedman>, Diakses tanggal 30 Juni 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/Pengawasan>, Diakses tanggal 5 Mei 2025.
- Kemdikbud, "Semua Bisa Sekolah! Zonasi untuk Pemerataan yang Berkualitas", terdapat dalam <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/07/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataanyang-berkualitas>. Diakses tanggal 28 April 2025.
- Mohamad Final Daeng, "Kelemahan Metode Penghitungan Jarak PPDB Zonasi di Yogyakarta Harus Dievaluasi," terdapat dalam <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/28/kelemahan-metode-penghitungan-jarak-ppdb-zonasi-di-yogyakarta-harus-dievaluasi>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.
- Muhammad Firhansyah, *Menggagas Fiqh Anti Maladministrasi*, terdapat dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--menggagas-fiqh-anti-maladministrasi>, Diakses tanggal 27 Mei 2025.
- Maya Septiana, "Investigasi Atas Prakarsa Sendiri : Terobosan Penyelesaian Maladministrasi Terkini," terdapat dalam

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--investigasi-atas-prakarsa-sendiri--terobosan-penyelesaian-maladministrasi-terkini>, Diakses tanggal 12 Juni 2025.

Ombudsman Republik Indonesia, "Langgar Aturan PPDB, Ombudsman DIY Beberkan Indikasi Kecurangan," terdapat dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkmedia--langgar-aturan-ppdb-ombudsman-diy-beberkan-indikasi-kecurangan>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.

QS World University Rankings, *QS Best Student Cities 2025*, terdapat dalam <https://www.topuniversities.com/city-ranking?page=3>. Diakses tanggal 28 April 2025.

Stefani Yulindriani Ria S. R, "ORI DIY Beberkan Modus Pungutan Liar Selama Tahun Ajaran Baru," *Harian Jogja*, terdapat dalam <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/06/19/511/1178459/ori-diy-beberkan-modus-pungutan-liar-selama-tahun-ajaran-baru>. Diakses tanggal 5 Mei 2025.

Bahan lain

Pamudji, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

Sumber Data Maladministrasi PPDB Bidang Pemeriksaan ORI DIY Tahun 2023-2024

Wawancara dengan Ibu Septiandita Arya Muqovvah selaku keasistenan pencegahan ORI DIY. 18 Juni 2025.

Wawancara dengan Bapak Rizqi Indra Himawan dari bidang perencanaan Dikpora DIY. 24 Juni 2025.